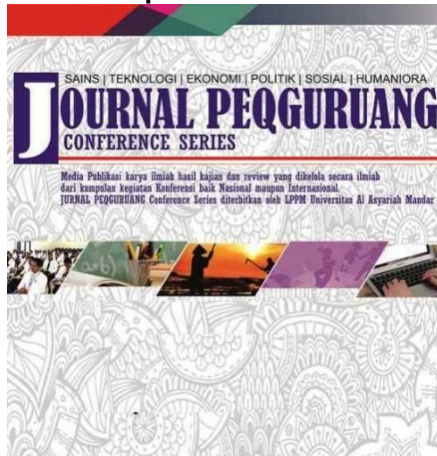


Graphical abstract



PERAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD) DALAM PERENCANAAN PARTISIPATIF DI DESA KABIRAAAN KECAMATAN ULUMANDA KABUPATEN MAJENE

¹*Muh Irfan, ²Sjuaib Hannan, ³Muhammad Massyat
¹Universitas Al Asyariah Mandar.

*Corresponding author

¹ Im0311297@gmail.com,

² Sjuaibhannan2019@gmail.com,

³ achatwibowo@gmail.com

Abstract

The Role of Village Community Empowerment Cadres (KPMD) in Participatory Development Planning in Kabharga Village, Ulumanda District, Majene Regency. Under the guidance of Sjuaib Hannan and Muhammad Massyat.

Research carried out in a method that is appropriate and relevant for the purpose under study. The method used by the author in this study is a qualitative descriptive study with a survey approach on the Role of the Village Community Empowerment Cadre (KPMD) in Kabharga Village, Ulumanda Sub-District, Kab.

The results of the study are seen from the indicators of Community Empowerment program planning, KPMD in Desa Kabharga, in the planning process it has constraints, due to the large absence of residents in the deliberation process to discuss the needs and priorities of development in the village, the village government is expected to have the responsibility in empowering KPMD by paying attention incentives, to be able to work in accordance with expectations by carrying out assistance tasks in the village.

Keywords: *Planning, Empowerment, Participatory Development.*

Abstrak

Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene. (Dibimbing oleh Sjuaib Hannan dan Muhammad Massyat).

Penelitian dilaksanakan dalam suatu metode yang tepat dan relevan untuk tujuan yang diteliti. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan survey tentang Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Di Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda Kab.Majene;

Hasil penelitian dilihat dari indikator perencanaan program pemberdayaan Masyarakat, KPMD di Desa Kabiraan ini, dalam proses perencanaannya memiliki kendala, dikarenakan banyaknya ketidak hadirannya warga dalam proses musyawarah untuk membahas kebutuhan dan prioritas pembangunan di desa, pemerintah desa diharapkan memiliki tanggungjawab dalam memberdayakan KPMD dengan memperhatikan pemberian insentif, agar dapat bekerja sesuai dengan harapan dengan melakukan tugas pembantuan di desa

Kata kunci: *Perencanaan, Pemberdayaan, Pembangunan Partisipatif.*

Article history

DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/jp.v2i2.1628>

Received : 15 September 2020 | Received in revised form : 24 September 2020 | Accepted : 13 Oktober 2020

1. PENDAHULUAN

Salah satu persoalan mendasar kehidupan bernegara dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan, baik di tingkat Pusat maupun Daerah adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme Pemerintahan yang dapat mengemban misinya untuk mewujudkan *Good Government*, Pemerintahan yaitu mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, Pemerintah harus melaksanakan pembangunan. Selain untuk memelihara keabsahannya, Pemerintah juga akan dapat membawa kemajuan bagi masyarakatnya sesuai dengan perkembangan zaman. “

Terdapat dua hal yang harus “dilaksanakan oleh pemerintah, Pertama,” perlu aspiratif terhadap aspirasi-aspirasi yang “disampaikan oleh masyarakatnya, dan” Kedua, “perlu sensitif “terhadap kebutuhan rakyatnya, yang pertama, Pemerintah perlu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya serta mau mendengarkan apa kemauannya. Dan yang kedua, Pemerintah perlu melibatkan segenap kemauan dan kemampuan “yang dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, dengan kata lain Pemerintah perlu menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek pembangunan. Adapun masyarakat sebagai subjek pembangunan adalah masyarakat yang terkena langsung atas kebijakan dan kegiatan pembangunan. Artinya bahwa masyarakat turut dilibatkan baik dari segi formulasi kebijakan maupun aplikasi kebijakan (Arifin, M, 2019).

Di beberapa Desa, ada masyarakat yang mengusulkan Program Sosial Budaya misalnya penanggulangan gizi buruk untuk balita, juga penanganan diare, ada juga penduduk kaum perempuan yang mengusulkan pemeriksaan dini terhadap gejala kanker leher rahim atau *papsmear*, usulan ekonomi produktif seperti Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP), Usulan Pisk sarana dan prasarana misalnya pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan drainase dan talud, pembangunan rabat beton dan lain-lain sebagainya. Usulan/ gagasan masyarakat tersebut dapat menjadi bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 6 Tahun.

Yang menjadi fokus permasalahan adalah Pemerintah Desa belum memberdayakan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), yang sudah lama terbentuk sejak adanya Program Pembangunan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sampai saat ini belum mendapatkan insentif yang wajar diberikan kepada kader-kader desa yang merupakan tugas pembantuan Pemerintah Desa dalam melaksanakan perencanaan pembangunan desa.

Mengacu pada masalah tersebut diatas, maka penulis melakukan penelitian secara mendalam dengan mengajukan Judul penelitian “Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Dalam

Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene”.

Tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran KPMD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam fasilitasi musyawarah tingkat desa yang berada pada Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda Kab. Majene.
2. Untuk mengetahui pengelolaan perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene.

2. METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara/teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian (Raco, J., 2018)

Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Amanto et al., 2016).

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang dimana metode penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Gunawan, I., 2013).

Alasan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan survey tentang tipe penelitian deskriptif yaitu guna memberikan gambaran atau penjelasan tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dalam melaksanakan perencanaan pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat Desa di Desa Kabiraan di Kecamatan Ulumanda Kab Majene.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini akan menampilkan seluruh data hasil penelitian yang didapatkan saat melakukan penelitian di Desa Kabiraan Kec. Malunda.

1. Gambaran Singkat Daerah Penelitian

Desa Kabiraan merupakan Desa gaya baru di distrik Ulumanda pada awal 1960-an. Sejak tahun 1969 untuk pertama kalinya dibentuk Desa tersebut sekaligus diselenggarakan pemilihan Kepala Desa pertama Kabiraan berasal dari kata dasar “BIRA” yang berarti batas yakni batas antara kerajaan Tomakaka Lombang yang sekarang menjadi Desa Sambabo.

Terbentuknya Desa Kabiraan pada tahun 1969 hingga saat ini berdasarkan UU No 18 tahun 1965 telah menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa sebanyak 6 (Enam) kali dan telah dipimpin oleh 8 orang Kepala Desa termasuk pelaksana tugas (Kepala Desa diangkat tanpa melalui pemilihan). Setelah dibentuk Desa gaya baru Kabiraan maka dimulailah system Pemerintahan Nasional yang dikepalai langsung oleh seorang Kepala Desa. (Pusat Pemerintahan Desa Kabiraan) orang yang pertama

menjadi Kepala Desa hasil pilihan rakyat adalah DG Massese mulai pada tahun 1969-1977 setelah aturan tentang Desa pada saat itu belum berjalan dengan sebagai mana mestinya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang mengaturnya kemudian lahir Undang-Undang Nomor 5 tahun 1975 tentang Pemerintahan di Desa. Namun pada saat Daeng Massese menjabat Kepala Desa meninggal dunia sebelum periode berakhir maka pada tahun 1977 diangkat Abdul Muis sebagai pelaksana tugas sampai 1978. Pada tahun 1978 diangkat FACHRI DP oleh Bupati Kepala Daerah tingkat 11 Majene sebagai Kepala Desa Kabiraan hingga tahun 1983.

2. Kondisi Desa

Kondisi Desa Kabiraan adalah daerah pedesaan yang berada didaerah pegunungan dengan ketinggian 400 – 450 dpl dan mempunyai luas wilayah 18 km yang terdiri dari 9 (Sembilan) Dusun dan 10 RT.

Desa Kabiraan merupakan salah satu Desa Di kecamatan Ulumanda yang berada Di Wilayah Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, dengan luas wilayah Desa Kabiraan 18 Km² Atau 120 Ha Desa Kabiraan Terdiri 9 Dusun, Dusun Kabiraan, Dusun Salupaondo, Dusun Tamalonang, Dusun Babasondong, Dusun Tamerimbi, Dusun Tamerimbi Barat, Dusun Tamerimbi Utara, Dusun Kampung Baru, dan Dusun Tappang.

Tabel 1 : Daftar Nama-Nama Kepala Desa yang menjabat dan Purnabakti

NO	NAMA	PERIODE	KET
1.	DG MASSESE	1967 - 1977	
2.	FACHRI, DP	1978 - 1983	
3.	T.PALIMBUANG	1983 - 1992	
4.	KOPKA ABD MALIK	1992 - 2000	
5.	ABDUL AZIS HAMING	2000 - 2008	
6.	SYAMSUL,S.SOS	2009 - 2016	
7.	PAHARUDDIN	2016 - Sekarang.	

3. Demokratif

Desa.Kabiraan tepatnya Di Kecamatan Ulumanda, Kab Majene Provinsi Sulbar

- wilayah didesa 120 : 120 H
 - Tanahnya disawah : 15 H
 - Tanahnya dipemukiman : 20 H
 - Tanahnya Lain-Lain : 65 H
- Perbatasan Wilayahnya :
 - bagian Utara : Desa Lombang Timor
 - bagian Selatan : didesa Sambabo
 - bagian Barat : Desa Sulai
 - bagian Timur : Desa Tadeallo
- Penduduk didesa : 1302 Jiwa
 - Jumlah Penduduk : 1383 Jiwa
 - Jumlah Penduduk Perempuan : 650 Jiwa
 - Jumlah Penduduk Laki-Laki : 652 Jiwa

- Jumlah KK : 361 KK
- Jumlah KK RTM : KK

d. Keadaan Iklim:

Di Desa Kabiraan ada 2 macam musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Sehingga sangat berpengaruh pada Masyarakat Petani dan pekebun.

- Curah Hujan : 12 Mm
- Jumlah Bulan Hujan : 5 Bln
- Kelembaban : 25 celcius
- Suhu Rata-Rata : 26 celcius s/d 27 celcius
- Ketinggian : 450 M dpl.

e. Orbitasi

- Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 1 Km
- Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 87 Km
- Jarak ke Ibu Kota Provinsi : 75 Km
- Jarak ke Ibu Kota Negara : -

f. Jenis dan kesuburan tanah

- Warnah Tanah: Coklat /Abu-Abu/hitam.
- Kemiringan Tanah

4. Keadaan Sosial

Secara sosial keadaan Desa Kabiraan dilihat dari beberapa bidang yaitu:

a. Bidang Keagamaan

Penduduk Desa Kabiraan mayoritas beragama islam terdapat Kelompok Ibu-ibu Majelis Taklim

b. Bidang kebudayaan

Penduduk Desa Kabiraan terdiri dari suku Mandar bahasa yang digunakan sehari hari adalah Mandar dan bahasa Pa,nei.

c. Bidang Pendidikan

Untuk Tingkat Pendidikan di Desa Kabiraan sebagian penduduknya tamat SMP dan sebagian telah melanjutkan Studinya ke perguruan tinggi Baik di Wilayah Sulawesi Barat Sulawesi, Selatan, Jawa, bahkan Sampai ke luar Negeri, karena Kesadaran Masyarakat dalam Hal Pendidikan Untuk mendorong anak-anak melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi sangat tinggi.

d. Keadaan Ekonomi

Mata Pencaharian penduduk Desa Kabiraan Yaitu:

Tabel 2 : Daftar Mata Pencaharian Penduduk Desa Kabiraan

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	PNS	32 Orang
2.	TNI/POLRI	- Orang
3.	BIDAN DESA	2 Orang
4.	KARYAWAN SWASTA Orang
5.	BURUH TANI Orang
6.	PETANI/PEKEBUN	- Orang
7.	INDUSTRI RUMAH TANGGA	
8.	PEDAGANG	15 Orang
9.	PEDAGANG KELILING	5 Orang
10.	PETERNAK	50 Orang

- e. Jenis Usaha yang ada di Desa Kabiraan:
 Peternakan Pertanian/Perkebunan Keterampilan
- Peternak Kambing
 - Peternak Sapi
 - Peternak Ayam
 - Pembuatan Kusen
 - Penyewaan Tenda

B. Pembahasan dan Hasil Wawancara

Salah satu tugas dan fungsi daripada pelaku Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Pengkajian Keadaan Desa (PKD) yang dimana jika diuraikan ialah sebagai berikut:

1. Penghasil diagram organda sebuah Desa.

Dari itu kita lengkapi sebuah petunjuk umum yang sudah dirancang sebelumnya, setelahnya ialah membuat sekat dari para lembaga yang telah sebelumnya ada didusun maupun didesa, salah satunya ialah kumpulan simpanan pinjaman seorang perempuan, disertakan pola hubungannya yang telah ada. Demikian pengkajian sebuah sistem organda yang ada sebelumnya ditengah masyarakat, fungsinya, sebuah perannya, serta pengaruhnya para lembaga yang sebelumnya telah ada. Setelah uraian diatas peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa Bapak Faharuddin, beliau mengatakan dalam kutipan wawancaranya sebagai berikut:

"Kader-Kader Desa yang telah dibentuk sejak adanya program Nasional Perencanaan Pembangunan Mandiri Perdesaan(PNPM-MP) masih berfungsi sampai saat ini, KPMD inilah yang senangtisa membantu kami dalam mengumpulkan data-data yang akan nantinya dibahas ketika sampai saatnya Musrebang Desa, KPMD yang membantu perencanaan pembangunan di desa, mulai pada tingkat RK, Dusun dalam mengali potensi desa, dan membuat diagram kelembagaan didesa. (wawancara, 15 Mei 2020).

Tujuannya pemetaannya berlembaga di Desa merupakan supaya bermasyarakat mendapat memanfaatkan organda yang ada untuk itu sarananya memecah permasalahan yang dihadapkan maupun mengoptimalkan berpotensi dilingkungan yang memiliki oleh pedesaan, pemetaannya berlembaga dengan memakai strategi yang diagram venn yaitu melakukan menemukan organda yang sangat dekat dengan lokasinya warga sekitar, sebuah kekuatan dan beberapa potensi, hubungannya antara organda disertakan peluangnya dan pemanfaatannya bagi masyarakatnya itu semua. Berikut beberapa kutipan pernyataan dari Kepala Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda:

"Saya berterima kasih kepada KPMD telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memecahkan masalah yang ada dalam desa sekaitan dengan potensi yang ada, namunpun KPMD yang ada di desa kami belum memberikan insentif yang memadai dari desa, namun Saya berharap agar KPMD tetap eksis dalam menjalankan perannya (wawancara, 10 Mei 2020).

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua BPD Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda, menyatakan bahwa:

"... Saya sebagai pengurus BPD Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda, berharap agar apa yang menjadi tugas dan kewenangan dalam kelembagaan desa kita ini termasuk KPMD, agar senangtiasa aktif dalam fasilitasi kegiatan perencanaan pembangunan desa. (wawancara 10 Mei 2020).

Adapun yang di kemukakan oleh Sekretaris BPD Desa Kabiraan Kec. Ulumanda (Abd.Salam) sekaitan dari pada keberadaan KPMD dan juga sebagai Fasilitator Desa, menyatakan sebagai berikut :

"...KPMD sebenarnya adalah Kader Desa yang dipilih oleh masyarakat setempat yang berfungsi sebagai pemandu dalam setiap kegiatan-kegiatan pertemuan yang ada di desa, sehingga bahwa semestinya KPMD ini bukan hanya mendapat insentif Pemerintah Desa, tapi juga harus mendapat insentif dari desa itu sendiri, karena KPMD bukan milik lembaga lain melainkan milik desa yang terdiri dari 5(lima) orang pengurus, sementara yang mendapat insentif hanya 2 orang saja, maka dari itu, apabila KPMD di desa kita yang malas atau tidak aktif dalam setiap pertemuan di desa, itu dikarenakan tidak adanya perhatian dan pemberian insentif dari desa itu sendiri.(wawancara, 12 Mei 2020).

Hal lain yang di kemukakan oleh (Muhtar) salah seorang masyarakat yang ada di Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda adalah sebagai berikut:

"... KPMD di Desa kita belum melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, karena setiap pertemuan jarang kita temukan dalam memandu kegiatan pembangunan, sehingga kami masyarakat awam masih banyak belum memahami tentang keberadaan KPMD, terkadang juga kami beranggapan buat apa ada KPMD kalau pembangunan kita tidak berjalan normal, bahkan pembangunan di desa kita dalam setahunnya hampir tidak ada (wawancara, 12 Mei 2020).

Adapun yang dikemukakan dari pengurus KPMD sependapat apa yang disampaikan oleh pengurus BPD, mengemukakan alasan tentang mengapa pengurus KPMD kurang aktif di desa, berikut pernyataannya sebagai berikut:

"...KPMD di desa kita, kalau melihat daripada kewajibannya, jauh dari apa yang diharapkan dalam melaksanakan tugasnya, karena menurut yang diatur dalam Peraturan Teknis Operasional, salah satunya menyusun perencanaan desa bersama dengan Tim di Desa, dan juga berfungsi fasilitasi pertemuan di tingkat desa dan membantu Fasilitator Kecamatan dalam proses perencanaan pembangunan Musrebang Desa, harapan kami selaku pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat berharap bahwa KPMD bisa lebih baik dan melaksanakan Tupoksinya dalam membantu pemerintah desa untuk menggagas masa depan desa. (wawancara, 14 Mei 2020)

2. Pembuatan kalender Musim

Untuk melengkapi sketsa desa dan diagram kelembagaan perlu disusun tahunan musiman, tahunan musiman merupakan media mengkaji untuk

mengungkap peristiwa/persoalan didalam berkehidupan bermasyarakat yang erat kaitannya pada perubahan siklus. Berikut ini petikan pernyataan dari Tim Pelaksana Kegiatan pembangunan di Desa Kabiraan:

“...Keberadaan KPMD di Desa kita sangat penting, karena salah satu tugas yang harus dilaksanakan untuk mengidentifikasi musim pancaroba, kemarau dan musim hujan, agar apa yang dapat dilaksanakan dalam perencanaan pembangunan dapat diantisipasi setiap kegiatan, misalnya pada musim hujan kegiatan pembangunan dapat berakibat kerugian, maka dari itu bahwa perlu adanya kalender musim untuk mengatasi masalah dan potensi di desa (wawancara, 14 Mei 2020).

3. Musyawarah Penggalan Gagasan

Tahapan berikutnya setelah pertemuan dusun pembuatan Sketsa Desa, Diagram Kelembagaan dan Kalender Musim adalah musyawarah penggalan gagasan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penggalan gagasan sebagai berikut:

- a. Sketsa Desa, data RTM, dan lembar diagram kelembagaan yang telah disepakati ditampilkan dan dijelaskan kepada peserta oleh fasilitator, serta sampaikan tentang visi program yang berupaya untuk mengurangi kemiskinan pada rumah tangga miskin yang ada.
- b. Fasilitator mengajak peserta untuk menemukenali masalah yang sering dihadapi dan mengakibatkan sebagian warga masih miskin. Apa penyebab masalah tersebut? Apa yang harus dilakukan, dibangun, disediakan? Hasilnya dituliskan pada kertas plano.
- c. Fasilitator mengajak peserta menemukan potensi serta sumber daya lokal yang ada, pada peta yang ada diperlihatkan apakah sudah tercantum, jika belum perlu dilengkapi sesuai lokasi yang ada.
- d. Peserta diminta untuk menyampaikan gagasan kegiatan yang dapat mengatasi masalah kemiskinan, dan didukung potensi/sumberdaya lokal, sebagaimana yang ada pada peta sosial, gagasan yang disampaikan peserta setelah disepakati dituliskan pada tabel di bawah ini, dan digambarkan/diberi tanda mencolok (merah) pada lokasi sesuai peta sosial, perlu disampaikan penegasan bahwa gagasan-gagasan yang akan datang disampaikan peserta tidak terbatas pada kurun waktu saat ini, tetapi menjangkau sampai dengan lima (5) tahun yang akan datang.
- e. Tabel yang berisi gagasan-gagasan tersebut harus didokumentasikan dengan baik.
- f. Didiskusikan dengan peserta untuk membahas setiap gagasan berdasarkan kriteria-kriteria.

Dengan demikian dapat diharapkan bahwa perencanaan pembangunan pedesaan sebagai bagian integral dari pada pembangunan yang dapat tercapai sesuai yang diharapkan, sehubungan dengan itu, maka peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) sangat menentukan bagi berhasilnya suatu perencanaan yang dilaksanakan di masyarakat

berdasarkan fungsi dan tugasnya sebagai pemandu pelaksanaan perencanaan pembangunan desa.

Pelaksana Pemberdaya Masyarakat Desa (PPMD) adalah organisasi Non Pemerintah yang bertugas membantu Pemerintah Desa dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, pelestarian serta evaluasi. pelaksana Pemberdaya Masyarakat Desa (PPMD) Fasilitator desa dalam perencanaan pengkajian keadaan desa, yaitu menggali potensi desa dimulai dari pengkajian potret desa, diagram kelembagaan dan kalender musim, KPMD sebagai fasilitator didesa yang eksis dan dinilai oleh masyarakat desa sebagai lembaga yang paling banyak berperan dalam perencanaan pembangunan desa, berikut ini adalah penilaian respondem tentang lembaga ini yang paling banyak berperan dalam menggerakkan masyarakat dalam partisipasi pembangunan.

4. SIMPULAN

Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan, maka dapat disimpulkan gambaran mengenai Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) di Desa Dilihat dari indikator perencanaan program pemberdayaan Masyarakat, KPMD di Desa Kabiraan ini dalam proses perencanaannya memiliki kendala dikarenakan banyaknya ketidakhadiran warga masyarakat dalam proses musyawarah membahas kebutuhan dan prioritas pembangunan di desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dipandu oleh KPMD di Desa Kabiraan ini dalam pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan utamanya dalam hal pelaksanaan kegiatan dibidang ekonomi, pelaksanaan kegiatan Perencanaan pembangunan fisik maupun non fisik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, M., Mudar, S., & Hi Abdullah, M. (n.d.). *Sistem informasi pengolahan data balita berbasis website pada kantor upt-kb kec. Ternate selatan*. 3(September 2018), 85–92.
- Arifin, M. (2019). Peran Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi Kasus Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene). *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 2(1).
- Amanto, O., Hamzah, M. I., & Rapani, A. (2016). *Pengaruh Biaya Direct Marketing, Biaya Personal Selling, Dan Biaya Pemberian Diskon Terhadap Nilai Penjualan Pada PT. Trijaya Makmur Cemerlang*. 1(1), 1–34.
- Gunawan, I. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 143.

Lestari, A., Coyanda, J. R., & Dasrial, 2015. (2015). Sistem Infomasi Pelelangan Barang Secara Online Pada PT . Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Pasar 26 ILIR Palembang. *Jurnal Informatika Global*, 6(1), 8–12. <https://doi.org/10.1016/j.apcata.2007.03.009>

Raco, J. (2018). Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya.

Ridwan, D. A., & Rahman, B. (2019). *Penentuan Penerimaan Raskin (Beras Miskin) Pada Kecamatan Kendari Barat Menggunakan Metode Analythical Hierarchi Process (AHP)*. 4(1), 25–31.

Ruskan, E. L., Ibrahim, A., & Hartini, D. C. (2013). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Hotel Di Kota Palembang Dengan Metode Simple Additive Weighting (Saw). *Jurnal Sistem Informasi*, 5(1), 546–565.

Massyat, M. (2019). ANALISIS PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT TAPALANG KABUPATEN MAMUJU. MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi, 2(1).

Firmansyah, M. A. (2021). ANALISIS KINERJA PEGAWAI KANTOR CAMAT MUARA KELINGI DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PEMBUATAN KTP ELEKTRONIK (KTP-e) DI KABUPATEN MUSI RAWAS (Doctoral dissertation, Ilmu Pemerintahan).

Hannan, S. (2019). MANAJEMEN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA KANTOR KECAMATAN MALUNDA KABUPATEN MAJENE. MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi, 2(1).